

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu sektor penting yang harus diperhatikan dalam kelangsungan hidup sebuah negara, dan merupakan kebutuhan dasar manusia adalah pendidikan. Pendidikan juga merupakan sektor terpenting dalam peningkatan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat, sehingga suatu pendidikan itu harus berkualitas karena menjadi kunci utama dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia. (Safrida et al, 2021).

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada Pasal 11, Ayat (1), disampaikan terkait dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah itu terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian dalam Pasal 12, Ayat (1) disampaikan terkait urusan pemerintahan wajib yang dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta (6) sosial.

Pendidikan merupakan aspek pemerintahan yang bersifat konkuren, yakni dibagi antara tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah. Pemerintah pusat kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan regulasi pembagian tugas pemerintahan. Dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merancang kebijakan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Pendidikan dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingginya kualitas pendidikan Indonesia sangat ditentukan melalui bagaimana tingkat kualitas pendidikan di setiap daerah. Jika kualitas pendidikan di daerah meningkat, maka kualitas pendidikan Indonesia pun akan meningkat pula.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk, dengan tujuan memenuhi hak dan kewajiban dasar. Konsep ini diperinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menguraikan adanya pembagian tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan yang bersifat mutlak merupakan wewenang Pemerintah Pusat, sementara tugas pemerintahan yang bersifat konkuren menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari prinsip otonomi daerah. Kabupaten Rembang sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan warga Kabupaten Rembang.

Pada bagian keenam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, diuraikan mengenai strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. Salah satu misi untuk merealisasikan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang selama periode tahun 2021-2026 adalah mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi dan mendapatkan perlindungan melalui jaminan sosial. Misi ini memiliki tujuan untuk mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai bentuk ukuran penilaian terhadap tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia. Salah satu target yang ingin dicapai adalah peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat. Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan ini adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dengan mendukungnya melalui program unggulan darmasiswa dan darmaguru. Kebijakan darmasiswa, yang selanjutnya disebut sebagai kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, merupakan bentuk konkret dari komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam memperluas dan menyamakan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut, terutama bagi individu berprestasi yang berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mampu.

Dalam pelaksanaan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, merujuk pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, di mana Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi diidentifikasi sebagai salah satu program unggulan pada periode tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020, disampaikan dalam Pasal 2 Ayat (2) bahwa:

“Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu.”

Adapun kriteria calon penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi berdasarkan Pasal 4 poin (a), (b), dan (c) Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Calon penerima beasiswa harus merupakan peserta didik dan/atau lulusan SMA atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat keterangan lulus yang telah dinyatakan diterima pada perguruan tinggi swasta di Kabupaten Rembang.
2. Calon penerima beasiswa harus merupakan penduduk Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Calon penerima beasiswa harus berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020, mekanisme teknik pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi bagi masyarakat berprestasi bidang akademik ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Berdasarkan ketentuan ini, disusunlah Petunjuk Teknis Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Juknis Beasiswa Dikti) setiap tahun sekali, sebagai standar operasional prosedur dan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Juknis Beasiswa Dikti Tahun 2023, disampaikan terkait dengan maksud dan tujuan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi sebagai berikut.

“Maksud dari Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah untuk perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi di Kabupaten Rembang. Sedangkan tujuan Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu.
2. Memberikan jaminan bagi para penerima beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.
3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu komponen pendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.
4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang.”

Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi merupakan inisiatif yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Rembang. Kebijakan ini diberlakukan sejak tahun

2017, sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, dan masih berlanjut hingga saat ini.

Sejak tahun 2017, persebaran jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi di berbagai perguruan tinggi negeri di pulau Jawa dan perguruan tinggi swasta di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 1 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Tahun 2017-2023**

No.	Tahun	Perguruan Tinggi		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1.	2017	37	-	37
2.	2018	52	-	52
3.	2019	52	-	52
4.	2020	26	7	33
5.	2021	51	18	69
6.	2022	42	20	62
7.	2023	22	22	44
<b>Jumlah</b>		<b>282</b>	<b>67</b>	<b>349</b>

**Sumber:** DINDIKPORA Kabupaten Rembang, 2023.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Tahun 2023, peningkatan akses ke pendidikan tinggi yang diperuntukkan kepada masyarakat yang memiliki prestasi di bidang akademis dan berasal dari keluarga tidak mampu merupakan tujuan pertama dari kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Namun, pada realita yang dibuktikan pada tabel 1.1 di atas, jumlah penerima beasiswa memang mengalami kenaikan pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2022 dan 2023 jumlah penerima beasiswa mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut. Artinya, jumlah

masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu yang berhasil mendapat akses pendidikan tinggi pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi belum dapat secara signifikan meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Selanjutnya, tujuan dari Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang. IPM sendiri merupakan barometer perkembangan kondisi kemajuan pembangunan manusia. Manusia yang berkualitas didefinisikan melalui beberapa aspek, yang meliputi: (1) Umur Panjang dan Hidup Sehat (A Long and Healthy Life), mencakup kesehatan fisik dan mental yang baik, serta memiliki harapan hidup yang panjang. Hal ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan agar dapat menikmati hidup yang berkualitas. (2) Berpengetahuan (Knowledge), memiliki pengetahuan yang luas dan berkualitas, baik dalam hal pendidikan formal maupun pengalaman sehari-hari. Manusia berkualitas dapat terus belajar dan mengembangkan pengetahuannya sepanjang hidup. (3) Hidup yang Layak (Decent Standard of Living), menyiratkan adanya kehidupan ekonomi yang memadai, akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Ini menciptakan kondisi di mana individu dapat hidup dengan martabat dan memiliki keamanan ekonomi.

Dengan demikian, konsep manusia yang berkualitas melibatkan keseimbangan antara kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak

untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Ukuran kualitas hidup inilah yang dijadikan dasar dimensi untuk mengukur IPM. Sehingga dapat dikatakan bahwa IPM juga mencerminkan kinerja pembangunan manusia. Dalam tiga tahun terakhir (2020-2022), pebandingan IPM pada eks-Karesidenan Pati, tingkat regional Jawa Tengah, dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Pati Tahun 2020-2022**

Kabupaten / Provinsi	Tahun		
	2020	2021	2022
<b>Rembang</b>	<b>70,02</b>	<b>70,43</b>	<b>71,00</b>
Blora	68,84	69,37	69,95
Pati	71,77	71,77	73,14
Kudus	75,00	75,00	75,89
Jebara	71,99	71,99	73,15
<b>Jawa Tengah</b>	<b>71,87</b>	<b>72,16</b>	<b>72,79</b>
<b>Nasional</b>	<b>71,94</b>	<b>72,29</b>	<b>72,91</b>

**Sumber:** BPS Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah dan IPM daerah eks-Karesidenan Pati. IPM Kabupaten Rembang hanya bisa mengungguli IPM Kabupaten Blora dan masih tertinggal dari kabupaten lain di sekitar dan IPM Jawa Tengah.

Sejak tahun 2014, penghitungan IPM mulai menggunakan metode baru dari *United Nations Development Programme* (UNDP). Indikator penghitungan IPM yang baru ini meliputi: (1) Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), (2) Harapan Lama Sekolah (HLS), (3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, dan (4) Pengeluaran per kapita yang



disesuaikan. Uraian perbandingan komponen penyusun IPM Kabupaten Rembang dengan rata-rata komponen penyusun IPM Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 3 Uraian Perbandingan Komponen Penyusun IPM Kabupaten Rembang dengan Rata-rata Komponen Penyusun IPM Jawa Tengah**

Komponen Penyusun IPM	Tahun					
	2020		2021		2022	
	JTG	RBG	JTG	RBG	JTG	RBG
Usia Harapan Hidup (UHH)	74,37	74,55	74,47	74,61	74,57	74,68
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,70	12,11	12,77	12,12	12,81	12,13
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,16	7,75	7,30	7,93	7,41
Pengeluaran Perkapita	10930	10328	11034	10519	11377	10937

**Sumber:** BPS Jawa Tengah

Jika dilihat dari komponen penyusunnya, komponen penyusun IPM Kabupaten Rembang yang tergolong rendah adalah komponen pendidikan (HLS dan RLS), dan pengeluaran per kapita. Hal tersebut yang menyebabkan IPM di Kabupaten Rembang masih rendah dibandingkan kabupaten sekitar.

Berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, salah satunya adalah dengan dilaksanakannya kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, namun dalam realitanya masih belum dapat berjalan optimal dalam meningkatkan IPM Kabupaten Rembang yang masih tertinggal dari kabupaten sekitar dan rata-rata IPM Jawa Tengah, khususnya pada komponen pendidikan (Harapan Lama

Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) yang dibuktikan pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 di atas.

Aspek mutu atau kualitas sumber daya manusia juga dapat dinilai melalui kemampuan atau keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu (BPS Jawa Tengah, 2022). Pengetahuan yang luas dan keterampilan tinggi cenderung dimiliki oleh seseorang yang berhasil menyelesaikan pendidikannya pada jenjang yang tinggi. Peningkatan kemampuan atau keterampilan secara keseluruhan akan mempermudah seseorang dalam mendapatkan peluang pekerjaan. Dengan demikian, mutu sumber daya manusia dapat dinilai berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil diselesaikan, sehingga semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin unggul mutu atau kualitas sumber daya manusianya.

Gambaran mutu atau kualitas sumber daya manusia Kabupaten Rembang berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 4 Persentase Masyarakat Kabupaten Rembang Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2020 - 2022**

No.	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun (%)		
		2020	2021	2022
1.	Perguruan Tinggi	6,9	7,6	7,2
2.	SMA / Sederajat	22,8	23,4	22,1
3.	SMP / Sederajat	21,9	21,7	23
4.	≤ SD / Sederajat	48,4	47,3	47,7

**Sumber:** BPS Kabupaten Rembang

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, persentase masyarakat Kabupaten Rembang berdasarkan pendidikan tertinggi yang

ditamatkan pada jenjang Perguruan Tinggi mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022. Pada tabel tersebut pula, dapat dilihat bahwa persentase masyarakat Kabupaten Rembang menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada jenjang Perguruan Tinggi adalah yang paling kecil dibandingkan dengan persentase pada jenjang lain. Bahkan, besar persentase-nya tidak lebih besar dari rata-rata persentase pada keseluruhan jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan masih sedikitnya jumlah masyarakat Kabupaten Rembang yang dapat merasakan bangku perkuliahan atau perguruan tinggi, sekaligus menjadi bukti bahwa masih rendahnya mutu sumber daya manusia Kabupaten Rembang berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan meski kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi telah berjalan selama hampir 7 tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang,” dengan melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dalam proses pengumpulan data dan sebagai lokus penelitian.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Ketidakstabilan jumlah penerima beasiswa yang menandakan belum signifikannya kontribusi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang dalam membantu peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari keluarga tidak mampu.
- 2) Masih rendahnya IPM Kabupaten Rembang, khususnya pada komponen pendidikan (HLS dan RLS), meski sudah diimplementasikan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang.
- 3) Masih rendahnya presentase pendidikan terakhir yang dimatikan masyarakat Kabupaten Rembang pada jenjang Pendidikan Tinggi, meski sudah diimplementasikan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mendeskripsikan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang.
- 2) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan.
- 2) Dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi penelitian terkait implementasi kebijakan, khususnya implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.
- 3) Dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan, khususnya implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, universitas, pemerintah Kabupaten Rembang, dan masyarakat.

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan tambahan bagi peneliti mengenai implementasi kebijakan, serta dapat menjadi pengalaman langsung bagi peneliti dalam meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah.
- 2) Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi penelitian ilmiah atau bahan rujukan untuk penelitian ilmiah selanjutnya yang sejenis atau terkait.
- 3) Bagi pemerintah Kabupaten Rembang; khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi alat bantu mengenai catatan keberjalanan dan bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi di masa yang akan datang.
- 4) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoretis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Teori	Hasil
1.	Rivaldo Josua Dissa, Johny Lengkong, & Welly Waworundeng (2023)	Implementasi Program “Beasiswa Minsel Perubahan” Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan	Melakukan kajian terhadap proses implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu program pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan	Model implementasi dari Van Meter dan Van Horn dilihat dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Disposisi implementor/sikap para pelaksana, Hubungan Antar Organisasi, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.	Pemberian beasiswa Minsel Perubahan telah memencapai tujuan awalnya jika dilihat dari aspek standar dan sasaran. Dari sumber daya waktu, implementasi program ini dapat dikatakan efisien, namun dalam hal sumber daya manusia masih terdapat kekurangan. Sikap pelaksana menunjukkan bahwa indikator karakteristik organisasi pelaksana telah memiliki kualitas baik, namun disisi lain diperlukan peningkatan jumlah staf serta pembaruan sarana dan prasarana. Selain itu, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik telah memberikan dukungan yang positif.
2.	Muhamad Habib Hussein, Ulul Albab, dan Zaenal Fatah (2023)	Implementasi Program Satu Desa Dua Sarjana dalam Membantu	Memberikan perspektif mengenai implementasi dari	Teori model implementasi kebijakan oleh George C. Edward	Komunikasi antar implementor dan karakter pelaksana dalam implementasi kebijakan ini terbilang baik, namun struktur

		Mencegah Kesenjangan Pendidikan di Kabupaten Blora	program “Satu Desa Dua Sarjana” untuk mencegah terjadinya kesenjangan pendidikan di Kabupaten Blora	III yang mencakup komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi.	birokrasi belum optimal. Secara keseluruhan, program dinilai baik dalam memanfaatkan sumber daya. Evaluasi lebih lanjut diperlukan pada struktur birokrasi untuk maksimalkan hasil program.
3.	Akhmad Makhasin (2023)	Implementasi Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam Upaya Perlindungan Sosial di Desa Panggungharjo Sewon Bantul	Memberikan gambaran terkait implementasi program beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul beserta analisis faktor pendukung dan penghambatnya.	Model implementasi Van Horn dan Van Meter yang meliputi aspek standar dan sasaran, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, dan kondisi lingkungan.	Program pemberian beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana sukses memberikan akses pendidikan jenjang perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan. Dukungan dari Bapel JPS, adanya dana desa, dan ketersediaan sarana prasarana merupakan sebagai sumber daya program. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana serta struktur organisasi dan pembagian tugas sudah terlaksana dengan baik. Lingkungan program didukung oleh keterlibatan semua organisasi terkait. Komitmen serta kemampuan agen pelaksana telah mencerinkan disposisi yang dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat faktor penghambat yang meliputi



					keterbatasan SDM dan kerusakan fasilitas.
4.	Rian Mustaufa (2023)	Implementasi Program Beasiswa Gunungkidul Cerdas Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gunungkidul	Memberikan gambaran mengenai implementasi program Beasiswa Gunungkidul Cerdas dan menganalisis dimensi yang menjadi faktor pendukung dan penghambat nya.	Teori implementasi dari George C. Edward III, yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Implementasi program Beasiswa Gunungkidul Cerdas SMP di Kabupaten Gunungkidul sudah efektif dinilai dari intensnya komunikasi serta adanya sumber daya yang mencukupi. Disposisi pelaksana program positif, sesuai dengan kompetensi masing-masing, dan struktur birokrasi telah didasarkan pada peraturan. Namun, keterbatasan kuota penerima beasiswa, nominal yang belum memadai, penggunaan dana yang kurang dikontrol, dan proses pencairan yang lambat menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan beasiswa ini.
5.	Enricho Chiesa Tumundo, Saran Sambiran, Ismail Sumampow (2023)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Minahasa Utara	Mengkaji implementasi kebijakan daerah berupa pendidikan gratis bagi siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Utara	Model implementasi kebijakan dari Charles O. Jones yang meliputi aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.	Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara terkait pendidikan gratis untuk siswa SD dan SMP telah diimplementasi-kan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, termasuk pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi kebijakan tersebut.

6.	Ulfatul Khoiriyah, Masduki Ahmad (2023)	Policy Implementation of the Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Program by the Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek)	Menggambarkan implementasi dari program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek)	Model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Adanya program Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat, guru dan tenaga kependidikan. Masalah yang masih perlu diatasi dalam kebijakan ini dan perlu dilakukan upaya lebih lanjut adalah meyakinkan publik terkait dengan manfaat program BPI yang unggul dalam menangani permasalahan pendidikan.
7.	Tubagus Nurul Fahmi (2023)	Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Memberikan gambaran implementasi program KIP-Kuliah Merdeka di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)	Teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan keempat indikatornya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.	Program KIP-Kuliah Merdeka berhasil dilaksanakan dengan seleksi ketat. Hambatan dalam pencairan uang saku dan registrasi KRS muncul dari mahasiswa yang terlambat mengisi registrasi ulang, meskipun sudah dihimbau sebelumnya. Perlu peningkatan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam prosedur administratif.
8.	Hasna Yuridha Fatm (2022)	Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan Bagi	Memaparkan implementasi kebijakan pemerataan	Model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang meliputi aspek	Kebijakan pemerataan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin di RA Al-Amin dilatarbelakangi oleh tingginya biaya sekolah. Tujuannya

		Anak Miskin di Al-Amin, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman	pendidikan di RA Al-Amin bagi siswa dari keluarga miskin beserta faktor pendukung dan penghambatnya.	komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	adalah untuk meluaskan akses pendidikan serta meringankan beban finansial orang tua. Kebijakan ini didukung dengan komunikasi efektif, sumber daya memadai, disposisi positif, dan struktur birokrasi terorganisir. Sedangkan keterbatasan dana masih menjadi faktor yang menghambat.
9.	Nunung Munawaroh, Hadi Pridatama Ramadhan (2022)	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah Menengah Pertama oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bandung	Menggambarkan implementasi, kendala, serta solusi terkait kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung.	Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut <i>Direct and Indirect Impact of Implementation</i> , yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Pendidikan gratis telah berjalan dengan sesuai dengan Perda Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung. Namun, masih terdapat kendala seperti kesalahan komunikasi, sarana dan prasarana yang terbatas, dan kurangnya partisipasi masyarakat.
10.	Ulyatun Tasyak (2022)	Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Mendeskrripsikan implementasi serta faktor pendukung dan penghambat program beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana (SRSJ) di	Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi aspek standar dan sasaran, sumber daya, kondisi lingkungan,	Tercukupinya sumber daya manusia dan finansial, serta kesesuaian standar terkait komunikasi antar organisasi pelaksana di lingkungan perguruan tinggi mendukung kesuksesan program Satu Rumah Satu Sarjana.

		Ponggok Kabupaten Klaten	Desa Ponggok Kabupaten Klaten	hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, dan disposisi implementor.	Tetapi pengawasan dari pemerintah desa belum optimal.
11.	Ulya Fitri, Reza Novandri (2022)	Implementasi Kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pariaman	Memberikan gambaran implementasi serta pencapaian kinerja kebijakan dari program satu keluarga satu sarjana (Saga Saja) di Kota Pariaman	Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, kecenderungan tingkah laku dan sikap, dan struktur birokrasi.	Dalam aspek komunikasi, disposisi, attitude, dan struktur birokrasi telah berjalan lancar. Namun, aspek sumber daya, ketersediaan staf dianggap kurang, dan kewenangan pos tanggung jawab masih belum jelas.
12.	Dandi Rahayu, Eka Yulyana, Rahman (2022)	Implementasi Kebijakan Beasiswa Karawang Cerdas dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelajar di Kabupaten Karawang	Memberikan deskripsi mengenai implementasi kebijakan Beasiswa Karawang Cerdas di Kabupaten Karawang dalam upaya peningkatan kesejahteraan pelajar.	Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Pelaksanaan kebijakan Karawang Cerdas di bidang komunikasi telah berhasil. Namun, pemerintah dianggap kurang transparan, dan terdapat indikasi pelanggaran oleh penyelenggara dan penerima beasiswa. Promosi intensif dalam disposisi kinerja pegawai masih kurang, tetapi struktur birokrasi telah dijalankan dengan baik.
13.	Yullya Putri Utami (2021)	Implementasi Program	Menyajikan deskripsi terkait	Model pendekatan implementasi	Dari segi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sudah

		Pemberian Beasiswa Daerah untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau	implementasi program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lumandau	kebijakan publik oleh George C. Edward III yang meliputi variabel atau faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	mencukupi. Aspek komunikasi, keterlambatan penyaluran dana, dari donatur, dan kurangnya perhatian mahasiswa terhadap sistematika dan persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini.
14.	Nurazizah Syarif (2020)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Beasiswa Mahasiswa sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur	Menyajikan gambaran implementasi kebijakan pemberian beasiswa mahasiswa di Kabupaten Luwu Timur	Teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier yang meliputi aspek karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang, faktor lingkungan.	Peningkatan alokasi anggaran dan jumlah penerima tiap tahun, membuktikan keberhasilan kebijakan beasiswa mahasiswa di Luwu Timur. Namun, penentuan sasaran dan ketegasan panitia pelaksana yang belum optimal menjadi hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini.
15.	Ali Roziqin, Irfan Murtadho Yusuf (2019)	Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018)	Melakukan analisis implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi di lingkungan Universitas Diponegoro	Teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Ketidakakuratan sasaran, keterlambatan penyaluran uang saku bulanan, kompleksnya proses birokrasi, dan kurangnya monitoring serta koordinasi dari pihak-pihak terkait masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini.

Tabel 1.4 di atas merupakan hasil pemetaan jurnal-jurnal terdahulu oleh peneliti, dimana keseluruhan jurnal memiliki pembahasan yang saling terkait mengenai beasiswa untuk mahasiswa dan program pendidikan gratis. Perbedaan besar antara penelitian-penelitian yang terlebih dahulu dilaksanakan tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus dan lokusnya.

Sebagian besar fokus dari penelitian terdahulu di atas adalah kebijakan atau program pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa, yaitu berupa beasiswa pemerintah daerah, program Satu Rumah Satu Sarjana (SRSJ), program satu desa dua sarjana, dan program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Merdeka. Kemudian sebagian kecil penelitian terdahulu lainnya merupakan program pembiayaan pendidikan atau beasiswa pada tingkat sekolah menengah. Sedangkan fokus penelitian ini adalah kebijakan beasiswa pemerintah daerah, yaitu Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

Lokus pada tiap-tiap penelitian terdahulu di atas berbeda-beda, mulai dari Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Blora, Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Minahasa Utara, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bandung, Klaten, Kota Pariaman, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Luwu Timur hingga Universitas Diponegoro. Sedangkan pada penelitian ini, lokusnya adalah di Kabupaten Rembang, tepatnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Selain pada fokus dan lokus, perbedaan penelitian yang lebih dulu dilaksanakan tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori atau model

implementasi kebijakan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut mengadopsi teori implementasi kebijakan yang beragam, mulai dari George C. Edward, Van Meter dan Van Horn, dan lain sebagainya. Namun pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dan menggunakan model implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn (1975), dengan terlebih dahulu melakukan perbandingan berbagai teori model implementasi kebijakan oleh berbagai ahli untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

### **1.5.1 Administrasi Publik**

Administrasi publik dibentuk dari dua kata, yaitu "administrasi" dan "publik". Asal kata "administrasi" sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yang terdiri atas "ad" yang berarti intensif, serta "ministrare" yang berarti melayani (*to serve*). Oleh karena itu, administrasi dapat diartikan sebagai melayani dengan intensif. Sementara itu, "publik" dapat diartikan sebagai umum, negara, masyarakat, atau orang banyak.

Administrasi publik menurut Menurut Nicholas Henry (1988:26), merupakan gabungan yang luas dan kompleks antara teori dan praktik yang memiliki tujuan untuk mendalami pemahaman tentang pemerintah serta keterkaitannya dengan masyarakat yang dikelolanya. Selain itu, dorongan responsivitas kebijakan publik terhadap kebutuhan sosial, penerapan praktik

manajerial yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan manusia yang lebih mendalam bagi warga negara menjadi tujuan dari administrasi publik. Secara sederhana, administrasi publik dipahami sebagai relasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan responsibilitas melalui penyelenggaraan pelayanan masyarakat, pemenuhan kebutuhan, dan pembentukan lembaga pemerintah yang efektif dan efisien.

Willoughby, dalam Dimock (1986:22), menyatakan bahwa administrasi publik adalah suatu bentuk fungsi yang mengimplementasikan hukum sesuai dengan yang dinyatakan oleh badan legislatif dan ditafsirkan oleh badan yudikatif pemerintah. Sementara itu, Leonard D. White juga menyatakan bahwa administrasi publik melibatkan semua tindakan yang ditujukan untuk pelaksanaan atau penerapan kebijakan negara.

Menurut Beddy Iriawan Maksudi (2017:226) dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer," administrasi publik didefinisikan sebagai suatu proses kerjasama rasional yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah. Dalam proses ini, untuk melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pencapaian tujuan negara dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik, sumber daya dan personel publik harus diorganisir dan dikoordinasikan.

Dalam Pasolong (2007) dan Malawat (2022), kegiatan sekelompok orang atau lembaga yang bekerja sama melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik yang efektif dan efisien merupakan bentuk suatu administrasi publik. Sementara menurut Ibrahim (2007), cakupan



administrasi publik meliputi seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan melalui kegiatan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan menggunakan mekanisme kerja dan adanya sumber daya manusia.

Hughes (1994) dalam Malawat (2022) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain, aktivitas melayani publik didalamnya disebut sebagai administrasi publik. Selanjutnya, Chandler dan Plano (1988) mengungkapkan bahwa proses pengkoordinasian dan pengorganisasian sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik dapat disebut sebagai administrasi publik.

Berdasarkan pernyataan berapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah rangkaian kegiatan pengorganisasian dan pengkoordinasian antara sumber daya dengan aktor dalam pemerintahan untuk merumuskan dan mengimplementasikan keputusan atau kebijakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik.

### **1.5.2 Paradigma Administrasi Publik**

Henry dalam Keban (2008:31-33), mengatakan terkait dengan perkembangan ilmu administrasi publik, telah terjadi lima paradigma sebagai berikut.

#### 1) Paradigma 1; Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Tokoh yang menjadi tonggak sejarah memicu fase paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dengan bukunya yang berjudul "*Politics and Administration*". Menurut Frank Goodnow, terdapat dua

fungsi pemerintahan, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Untuk fungsi yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan sebagai refleksi kehendak negara termasuk ke dalam fungsi politik, sementara fungsi administrasi lebih terkait dengan sisi pelaksanaan kebijakannya. Perbedaan antara kedua fungsi ini ditegaskan melalui konsep "pemisahan kekuasaan." Paradigma ini menekankan lokusnya, yaitu tempat di mana administrasi negara berada pada seharusnya, yang menurut Goodnow, terletak pada birokrasi pemerintahan. Paradigma ini sering disebut sebagai dikotomi politik-administrasi karena adanya pemisahan kekuasaan, namun di dalam paradigma ini fokus atau metode yang krusial untuk dikembangkan kurang dibahas secara menyeluruh.

2) Paradigma 2; Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Dengan terbitnya karya "*Principles of Public Administration*" oleh Wiloughby, muncul pandangan bahwa sepanjang waktu dapat berlaku prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal. Paradigma ini lebih menekankan fokus daripada lokus, karena prinsip administrasi dianggap tetap berlaku tanpa memperhatikan aspek budaya, lingkungan, tujuan, atau jenis organisasi.

3) Paradigma 3; Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Mendekati dekade 1930-an akhir, muncul banyak kritik tajam terhadap administrasi negara. Kritik pertama mencakup pandangan mengenai politik dan administrasi yang bisa dipisahkan, sementara kritik kedua menyangsikan universalitas prinsip-prinsip administrasi.

Herbert Simon menolak kedua kritikan tersebut, karena menurutnya tidak dapat dilakukan pemisahan antara politik dan administrasi, begitu pula dengan universalitas prinsip-prinsip administrasi itu sendiri. Pada fase paradigma ini, terjadi upaya untuk merestrukturisasi hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik.

4) Paradigma 4; Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Istilah ilmu administrasi dalam konteks ini mengacu pada studi dalam teori organisasi dan manajemen, yang bertujuan untuk mencapai peningkatan efisiensi dan efektivitas program-program yang ada secara lebih presisi. Pada paradigma ini, dilakukan pengembangan prinsip-prinsip manajemen secara ilmiah dan mendalam, dengan penekanan pada fokus lebih daripada lokusnya. Paradigma ini menitikberatkan pada perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern, tidak dianggap hanya dapat diterapkan dalam dunia bisnis saja, tetapi juga dalam administrasi publik, sehingga lokusnya menjadi tidak jelas atau kurang relevan.

5) Paradigma 5; Administasi Negara sebagai Administrasi Publik (1970)

Meskipun kata sepakat terkait lokus dan fokus administrasi negara belum tercapai, Herbert Simon mengidentifikasi dua aspek administrasi negara yang perlu diperluas, yaitu: (1) Pengembangan ilmu administrasi yang lebih berfokus pada perkembangan ilmu murni administrasi. Dalam dua dekade terakhir, teori organisasi lebih terfokus pada cara dan alasan organisasi beroperasi, perilaku anggota organisasi, serta proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. (2) Perhatian yang lebih besar

pada tahap penentuan kebijakan publik. Hanya sedikit kemajuan yang terlihat dalam fokus administrasi negara yang relevan bagi administrator negara. Fokus ini meliputi rumusan kepentingan publik, urusan publik, dan kebijakan publik yang seharusnya menjadi panduan bagi praktisi atau pembuat kebijakan.

6) Paradigma 6; *Governance*

Paradigma *governance* merupakan perubahan dari *government* yang menonjolkan kerja sama manajemen serta keseimbangan di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Paradigma ini menetapkan pelayanan publik sebagai ukuran keberhasilannya. (Mayarni, 2020). Gibson (2011:4) juga menyatakan hal serupa bahwa paradigma *governance* melibatkan kemitraan lain untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dan kemitraan yang termasuk adalah penduduk lokal, organisasi yang melayani masyarakat, sektor publik, dan sektor swasta. Dalam paradigma *governance*, peran pemerintah tidak bersifat tunggal atau mendominasi; sebaliknya, *governance* memberikan peluang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pengelolaan pemerintahan, terutama dalam konteks urusan publik.

Dalam beberapa tulisan, konsep *governance* sering disamakan dengan konsep *good governance*. Menurut Tony Bovaird dan Loffler (2003:100) seperti yang dikutip oleh Mayarni, *governance* dianggap sebagai konsep positivistik yang menganalisis situasi yang sebenarnya.

Sebaliknya, *good governance* dianggap sebagai konsep normatif yang menganalisis apa yang seharusnya terjadi.

*Good governance* merupakan suatu paradigma baru yang berorientasi kepada hubungan yang sinergik dan konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (Anwaruddin, 2004). Pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan melaksanakan pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk mencapai hasil yang terbaik, kebijakan harus dirumuskan sesuai dengan kesepakatan bersama di antara pemerintah dan *stakeholders*.

Konsep *governance* di atas yang menonjolkan kerja sama manajemen antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dengan pelayanan publik sebagai ukurannya menunjukkan suatu keterkaitan dengan administrasi publik. Dimana administrasi publik dapat diartikan sebagai kegiatan mencapai pemenuhan kebutuhan publik dengan mengkoordinasikan sumber daya yang ada dengan personel publik. Konsep *governance* dan administrasi publik pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan publik melalui pelayanan publik, sehingga perlu perumusan suatu kebijakan publik yang berorientasi pada tata pemerintahan yang baik sehingga pemenuhan kebutuhan publik yang adil dan merata dapat diwujudkan.

Penelitian ini menerapkan paradigma terakhir yaitu paradigma *governance*, dimana fokus yang diteliti yaitu kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi merupakan wujud upaya pelaksanaan tata kelola

pemerintahan yang menekankan kolaborasi manajemen antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi sektor publik, dan sektor swasta agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi pemerintahan.

### **1.5.3 Kebijakan Publik**

Para ahli dalam Malawat (2022), memberikan pendapat mengenai definisi kebijakan publik. Pertama, Thomas R. Dye (1992) menyatakan bahwa kebijakan publik berarti segala hal yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan. Selanjutnya, James E. Anderson (1970) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pengembangan kebijakan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Kemudian Gerston menyatakan kebijakan publik sebagai upaya pemerintah atau pejabat di berbagai tingkatan pemerintahan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.

Kebijakan publik menurut William N. Dunn (1999:109) dijelaskan sebagai rangkaian pilihan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan memiliki hubungan antar satu dengan yang lain (termasuk keputusan untuk tidak mengambil tindakan). Dalam berbagai isu, mulai dari pertahanan, energi, kesehatan, kesejahteraan, hingga kejahatan, pilihan-pilihan yang dibuat oleh pejabat pemerintah tersebut diformulasikan sebagai alternatif pemecahan masalah sesuai dengan isu yang ada. Dalam rangka memecahkan masalah, William N. Dunn dalam Supriyadi (2020) menyatakan beberapa tahap penting.

#### 1) Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap ini, Beberapa aktor yang dipilih dan diangkat bertanggung jawab dalam merumuskan masalah-masalah yang akan dimasukkan ke

dalam agenda kebijakan publik. Terlebih dahulu, masalah-masalah ini bersaing untuk mendapatkan prioritas dalam agenda kebijakan. Hal ini terjadi karena tidak semua masalah dianggap sebagai prioritas di dalam kebijakan publik. Pada akhirnya, hanya beberapa masalah yang berhasil dimasukkan ke dalam agenda kebijakan oleh para perumus kebijakan.

Beberapa masalah pada tahap ini mungkin saja tidak ditangani sama sekali, sementara yang lain menjadi fokus utama dari pembahasan kebijakan. Terdapat juga kemungkinan adanya masalah yang ditunda untuk diatasi dalam jangka waktu tertentu karena suatu alasan.

## 2) Tahap Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Setelah lolos dari agenda kebijakan, masalah-masalah tersebut menjadi fokus pembahasan oleh para perumus kebijakan. Mereka mendefinisikan masalah-masalah yang difokuskan tersebut dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Solusi-solusi ini diambil dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan paling solutif dan efektif, yang berusaha diusulkan oleh aktor yang terlibat. Sistem ini hampir sama dengan tahap sebelumnya, ketika masalah bersaing agar menjadi bagian dari agenda kebijakan, dimana pada tahap perumusan kebijakan, setiap alternatif yang diusulkan bersaing untuk dapat dipilih sebagai langkah konkret pemecahan masalah.

## 3) Tahap Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Para aktor perumus kebijakan menawarkan beragam alternatif kebijakan, dimana salah satu dari opsi tersebut akhirnya diambil sebagai langkah-

langkah lebih lanjut dalam rangka pemecahan masalah pada kebijakan publik.

4) Tahap Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Kebijakan hanya memiliki nilai jika diimplementasikan. Maka dari itu, alternatif kebijakan yang terpilih sebagai solusi masalah harus dijalankan oleh instansi pemerintah di tingkat eksekutif. Implementasi kebijakan melibatkan mobilisasi sumber daya finansial dan tenaga kerja oleh badan-badan pemerintah. Saat mengimplementasikan kebijakan, seringkali muncul berbagai kepentingan yang bersaing, di mana sebagian pelaksana mendukung sementara yang lain mungkin menentang.

5) Tahap Penilaian atau Evaluasi Kebijakan (*Policy Assessment*)

Setelah melalui tahapan-tahapan terdahulu, alternatif kebijakan terpilih yang telah diimplementasikan selanjutnya akan dievaluasi agar dapat dilihat sejauh mana kemampuannya dalam mengatasi masalah. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak yang diinginkan dari kebijakan publik yang telah diimplementasikan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Untuk menilai dampak tersebut, dibentuklah ukuran atau kriteria sebagai dasar penilaian terhadap pencapaian dampak yang diinginkan dari kebijakan publik tersebut.

#### **1.5.4 Implementasi Kebijakan**

Seperti yang diuraikan oleh Wahab (2004) dalam karyanya, Van Meter dan Van Horn memaparkan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah, ataupun swasta dengan maksud



untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat disebut sebagai implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) dalam Jumroh dan Pratama (2021), dalam realitanya bukan sekadar mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi. Implementasi kebijakan melibatkan konflik dan keputusan terkait siapa yang mendapatkan manfaat dari suatu kebijakan.

George C. Edward dalam Nurhasanah (2012), menyebut implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari keseluruhan rangkaian tahap-tahap pembuatan kebijakan (*policy making*). Dimana bentuk dari tahap ini adalah berupa pelaksanaan tindakan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan konsekuensi kebijakan tersebut terhadap masyarakat sasaran. Bentuk kebijakan yang dapat diimplementasikan dapat berupa pengesahan sebuah undang-undang, pemberian perintah eksekutif, pengambilan keputusan yudisial, atau pengumuman peraturan regulasi. Sedangkan konsekuensi yang dimaksud adalah konsekuensi yang memang diharapkan karena berdampak positif, namun ada juga konsekuensi yang tidak diharapkan karena akan merugikan pihak tertentu.

Dalam Kurniawan (2014), Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1980) memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan untuk menjalankan keputusan kebijakan dasar. Keputusan ini umumnya berbentuk undang-undang, perintah eksekutif atau putusan badan peradilan yang

berwenang. Keputusan dasar tersebut mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, dan menyusun berbagai langkah untuk mengorganisir dan mengatur rangkaian proses implementasinya. Mazmanian dan Sabatier dalam Subianto (2020), memandang bahwa perumusan suatu kebijakan dan implementasinya secara analitis memang dapat dibedakan, tetapi bukan merupakan entitas terpisah. Berdasarkan konsep ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan serangkaian tindakan lanjutan setelah penetapan kebijakan, mencakup pengambilan keputusan, tahapan strategis, dan kegiatan operasional. Tujuannya adalah mewujudkan terealisasinya kebijakan dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier karena implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi termasuk ke dalam bentuk upaya untuk menjalankan keputusan kebijakan dasar yang dalam hal ini berbentuk peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan pada ditetapkannya Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi.

#### **1.5.5 Model-model Implementasi Kebijakan**

Terkait dengan model implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn (1975), seperti yang diuraikan oleh Subarsono (2005:99), mengembangkan model pendekatan sebagai suatu fenomena yang memengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan dan menyebutnya dengan "*A Model of the Policy Implementation*". Enam aspek kunci dalam model ini mencakup:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Untuk mencegah terjadinya multi interpretasi serta konflik di antara pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan, suatu kebijakan harus memiliki kejelasan standar dan sasaran serta dapat diukur.
2. Sumber daya. Diperlukan dukungan sumber daya manusia maupun non-manusia dalam suatu implementasi kebijakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya.
3. Karakteristik organisasi pelaksana. Dalam hal implementasi kebijakan, birokrasi, penerapan etika atau norma-norma, serta pola hubungan dalam birokrasi, dapat memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan.
4. Disposisi implementor atau sikap para pelaksana. Disposisi implementor disini mencakup respons, pemahaman, dan intensitas disposisi implementor terhadap kebijakan, yang dapat memengaruhi kemauan mereka untuk melaksanakannya.
5. Komunikasi antar organisasi terkait. Dukungan dan koordinasi dengan instansi lain sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan. Maka dari itu, perlu komunikasi efektif agar kerja sama antar instansi terkait dapat terjalin dengan baik dan dapat membawa pada keberhasilan suatu implementasi kebijakan itu sendiri.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Aspek lingkungan eksternal ini mencakup sumber daya ekonomi di lingkungan pengimplementasian

kebijakan, dukungan dan kerja sama dari kelompok kepentingan, sikap partisipan, opini publik, serta dukungan elite politik.

Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini, model tersebut menjadi suatu kerangka kerja yang holistik untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Marille S. Grindle (1980) mengemukakan model implementasi kebijakan “Proses Administratif dan Politik,” dimana keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui dua variabel kunci, yaitu *content variable* dan *context variable*, atau dapat disebut sebagai variabel isi dan variabel konteks dalam kebijakan. Variabel isi disini berkaitan dengan apa yang tercakup dalam substansi kebijakan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi implementasinya. Sementara itu, variabel konteks terkait dengan pengaruh kebijakan terhadap konteks politik dan proses administratif dalam implementasinya. Dengan mempertimbangkan kedua variabel ini, dapat diukur sejauh mana kebijakan dapat berhasil diimplementasikan.

a) Variabel *Content* memiliki enam dimensi, yang meliputi:

1. *Interest Affected* (pihak yang kepentingannya dipengaruhi). Suatu kebijakan yang mempengaruhi pihak-pihak dengan kepentingan tertentu dapat memicu respons politik dalam proses perumusan suatu kebijakan.
2. *Type of Benefits* (manfaat yang diperoleh). Kebijakan yang cenderung lebih mudah diimplementasikan adalah kebijakan yang memberikan

manfaat secara kolektif. Sedangkan kebijakan yang manfaatnya bersifat partikularistik dapat menimbulkan konflik.

3. *Extent of Change Envisioned* (jangkauan yang diharapkan). Kebijakan dengan visi perubahan jangka panjang atau signifikan lebih sulit diimplementasikan.
4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan). Kebijakan dengan pengambilan keputusan yang semakin tersebar secara geografis atau organisasional, akan semakin sulit implementasinya.
5. *Program Implementor* (pelaksana program atau kebijakan). Kualitas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.
6. *Resources Committed* (sumber-sumber yang dapat dialokasikan). Untuk mendukung kelancaran kebijakan, diperlukan ketersediaan sumber daya yang memadai.

b) Variabel *Context* memiliki tiga dimensi yang meliputi:

1. *Power, Interest, and Strategies of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat). Dalam suatu implementasi kebijakan, keterlibatan para pihak dipengaruhi oleh konten dan konteks kebijakan yang diimplementasikan.
2. *Institution and Regime Characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim). Kemampuan dan kekuatan aktor yang terlibat serta karakteristik rezim memungkinkan kemudahan penilaian terhadap suatu peluang pencapaian tujuan kebijakan.

3. *Compliance and Responsiveness* (kesesuaian dan responsivitas). Para pejabat pelaksana dalam implementasi kebijakan perlu fokus pada bagaimana konsistensi tujuan dalam kebijakan itu itu dapat dicapai.

George C. Edwards atau Edwards III (1980) mengemukakan model pendekatan implementasi yang di dalamnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

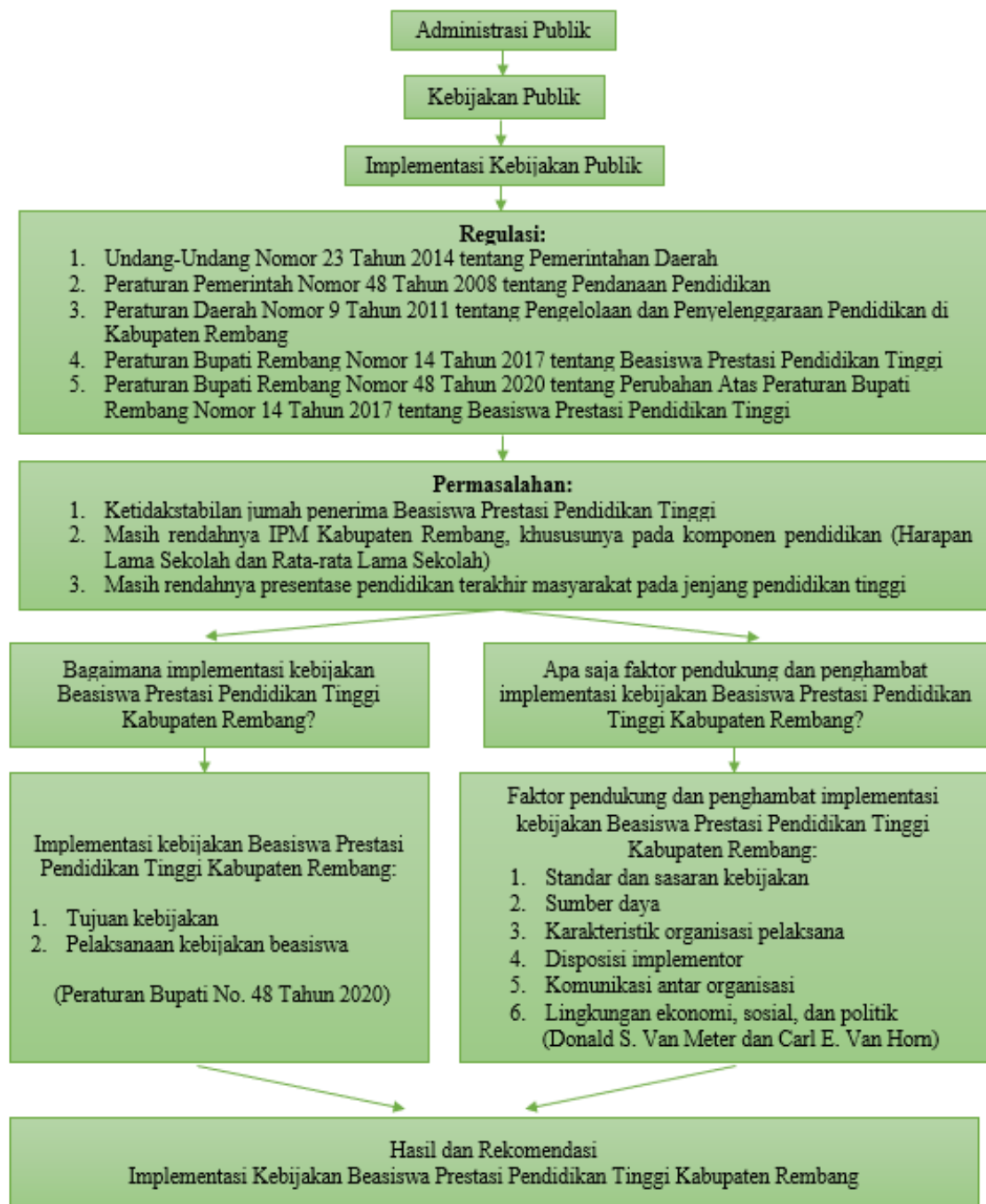
- 1) Komunikasi, yang berkaitan dengan interaksi antara aktor perumus kebijakan, aktor pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.
- 2) Sumber daya, yaitu kondisi tersedianya berbagai sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan kebijakan.
- 3) Disposisi, yaitu sikap dan perilaku dari pelaksana kebijakan.
- 4) Struktur birokrasi, berupa pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan tugas melalui penetapan SOP (*Standard Operating Procedure*).

Mazmanian dan Sabatier (1983) juga memberikan usulannya terkait dengan model analisis implementasi sebagai kerangka dalam melakukan analisis implementasi kebijakan. Mereka menyatakan bahwa aspek kunci dari proses analisis implementasi kebijakan adalah identifikasi variabel yang memengaruhi pencapaian tujuan formal selama seluruh proses implementasi. Variabel atau dimensi-dimensi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Mudah tidaknya permasalahan dikendalikan. Hal ini dinilai berdasarkan kesulitan teknis, variasi sikap kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap jumlah penduduk, dan perubahan sikap yang diharapkan.

2. Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi. Hal ini dapat dilihat melalui penilaian terhadap kejelasan dan konsistensi tujuan, penggunaan teori kausal yang memadai, ketepatan alokasi sumber daya, integrasi hierarki antar lembaga pelaksana, peraturan keputusan dari badan pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana, dan akses resmi pihak eksternal.
3. Variabel di luar kebijakan atau faktor eksternal yang memengaruhi proses implementasi. Dimensi ini melibatkan kondisi sosio-ekonomi serta teknologi, dukungan masyarakat, sikap dan sumber daya kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat, dukungan dari atasan atau pejabat pemerintah beserta komitmen dan kepemimpinannya.

### 1.5.6 Kerangka Berpikir



**Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian**



## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep disini menjelaskan mengenai bagaimana cara peneliti menjawab tujuan penelitian berdasarkan penjabaran interpretasi dari dimensi ataupun faktor-faktor yang akan diteliti. Maka dari itu operasionalisasi konsep pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

### 1) Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang

#### a. Tujuan Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang.

Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang merupakan kebijakan yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Rembang yang berprestasi namun berasal dari latar belakang keluarga tidak mampu. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, dimana peraturan tersebut memuat tujuan dari ditetapkannya kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang.

#### b. Pelaksanaan Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2020, termuat rangkaian mekanisme pelaksanaan kebijakan beasiswa yang

mencakup ruang lingkup, kriteria calon penerima, pelaksanaan, komponen, mekanisme pencairan, penghentian, dan pengawasan.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang

Model implementasi yang dipilih peneliti untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut.

a. Standar dan sasaran kebijakan

Untuk mencegah terjadinya multi interpretasi konflik di antara para pelaksana implementasi kebijakan, kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi harus memiliki kejelasan standar dan sasaran yang juga dapat diukur.

b. Sumber daya

Adanya dukungan sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, yang meliputi sumber daya finansial, sumber daya waktu, serta sumber daya sarana dan prasarama diperlukan dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi untuk dapat menunjang kelancaran implementasi kebijakan.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pada dimensi ini, yang dimaksud karakteristik organisasi pelaksana kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi adalah termasuk birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan dalam birokrasi,

yang semuanya dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi itu sendiri.

d. Disposisi implementor atau sikap para pelaksana

Dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu respon implementor, kognisi atau pemahaman implementor, dan intensitas disposisi implementor atau preferensi nilai terhadap kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi yang nantinya dapat memengaruhi kemauan mereka untuk melaksanakannya.

e. Komunikasi antar organisasi

Sebagaimana umumnya implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi juga seharusnya membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Oleh karena itu, agar koordinasi dan kerja sama antar instansi dapat berlangsung dengan lancar, diperlukan adanya komunikasi yang efektif dalam rangka menuju keberhasilan implementasi kebijakan.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Dalam konteks implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, fenomena ini melibatkan sejumlah aspek penting. Pertama, melibatkan lingkungan ekonomi yang dapat memberikan dukungan untuk menunjang kesuksesan implementasi kebijakan. Kedua, penting untuk menilai sejauh mana dukungan terhadap implementasi kebijakan oleh kelompok-kelompok

kepentingan. Perlu diperhatikan juga karakteristik partisipan dalam konteks apakah mereka mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Ketiga, melibatkan analisis terhadap opini publik di lingkungan implementasi kebijakan. Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dapat memberikan wawasan penting dalam perencanaan dan implementasi. Terakhir, melibatkan penilaian terhadap dukungan elite politik terhadap kebijakan tersebut, karena dukungan dari pihak politik berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan tersebut.

**Tabel 1. 6 Operasionalisasi Konsep**

No.	Konsep	Fenomena	Gejala
1.	Implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang	Implementasi kebijakan	a) Tujuan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi b) Pelaksanaan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi
2.	Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang	Standar dan sasaran	a) Kejelasan standar yang digunakan sebagai pedoman implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang b) Kejelasan sasaran kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi
4.		Sumber daya	a) Sumber daya manusia atau unit pelaksana kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang b) Sumber daya finansial yang menunjang keberjalanan kebijakan

			<p>Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang</p> <p>c) Sumber daya sarana dan prasarana penunjang kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang</p> <p>d) Sumber daya waktu yang dibutuhkan selama keberjalanan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang</p>
6.		Karakteristik organisasi pelaksana	Norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi organisasi pelaksana kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang
7.		Disposisi implementor	<p>a) Respon implementor terhadap kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang</p> <p>b) Kognisi atau pemahaman implementor terhadap kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang</p> <p>c) Intensitas atau preferensi nilai yang dimiliki implementor kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang</p>
8.		Komunikasi antar organisasi terkait	<p>a) Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang</p> <p>b) Koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah dengan pengelola beasiswa di perguruan tinggi</p>

			c) Kerja sama dengan instansi lain terkait penyebarluasan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang
9.		Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	<p>a) Lingkungan ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi pendukung keberhasilan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang</p> <p>b) Lingkungan sosial, berupa dukungan publik dan kelompok kepentingan terhadap implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang</p> <p>c) Lingkungan politik, tanggapan dan tindakan elite politik terhadap implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang</p>

### 1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan yang dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah implementasi kebijakan publik berupa kebijakan atau program pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa. Kebijakan pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa yang dibahas antara lain berupa beasiswa pemerintah daerah, program Satu Rumah Satu Sarjana (SRSJ), program satu desa dua sarjana, dan program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Merdeka di daerah di luar Kabupaten Rembang. Setiap peneliti dalam penelitian terdahulu tersebut

memiliki perbedaan pada tiap-tiap fokus dan lokusnya. Diperlukan sebuah ide atau gagasan agar dapat membuat penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila dilihat dari segi kebijakan publik, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai studi implementasi kebijakan pada Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Rembang. Maka dari itu, peneliti akan membahas mengenai studi implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Rembang, yang nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi ilmu administrasi publik terutama dalam bidang implementasi kebijakan, serta sebagai bahan evaluasi atau catatan perjalanan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mengenai implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang sejak dijalankan selama hampir 6 tahun lamanya.

## **1.8 Metode penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Terdapat dua tipe penelitian berdasarkan metode yang diterapkan, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Terkait dengan penelitian kuantitatif biasanya berbentuk pendekatan ilmiah yang menggunakan data berupa angka atau statistik untuk memahami fenomena, mengidentifikasi pola, dan menguji hipotesis. Di sisi lain, penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan atau memberikan pemahaman mengenai ketidaksesuaian antara keadaan yang seharusnya dan keadaan yang terjadi secara nyata dengan menggunakan bentuk narasi atau kalimat yang jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis pemeriksaan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian ini menjelaskan dan memberi pemahaman mengenai keadaan yang seharusnya terjadi dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang dengan digambarkan dalam bentuk narasi berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang telah dilakukan.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian menurut Moleong dalam Shofa (2020) dijelaskan sebagai informan, yang artinya orang yang menjadi tempat penelitian. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:218), teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kepentingan informan, yang dalam hal ini memiliki kepentingan terkait dengan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. Subjek dalam penelitian ini meliputi: Kepala Subbagian Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, Staff Biro Akademik dan Keuangan Universitas Diponegoro, Staff Bagian Penerimaan pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Diponegoro, Mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi



Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang yang masih aktif mengikuti perkuliahan (angkatan 2021), dan mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang yang telah lulus (angkatan 2019).

#### **1.8.4 Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif yang berasal dari wawancara dengan informan yang meliputi Kasubbag Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, staff pengelola penyaluran beasiswa di perguruan tinggi, serta mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung mengenai keberjalanan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, studi literatur berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, jurnal penelitian terdahulu ataupun publikasi seperti Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) tahun 2019-2020 dari alamat *website* resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, serta publikasi Analisis Kualitas Pembangunan Manusia 2019-2022 dari *website* resmi BPS Jawa Tengah.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, yaitu berupa hasil wawancara terhadap subjek penelitian, dan observasi terhadap objek penelitian. Sedangkan untuk data sekunder peneliti dapatkan dari jurnal, artikel, data publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, dokumen

resmi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, serta bahan bacaan lain mengenai topik yang peneliti bahas pada penelitian ini.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Cara atau prosedur dalam mendapatkan informasi yang nantinya diharapkan dapat menjawab isu atau permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian merupakan teknik pengumpulan data. Ada tiga macam strategi pemilahan informasi, yang meliputi observasi atau pengamatan secara langsung, wawancara, dan dokumentasi mengenai keberjalanan atau implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang.

Observasi dalam penelitian ini adalah sebagai persepsi langsung mengenai implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang di lapangan. Sedangkan wawancara adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam bentuk diskusi atau tanya-jawab dengan subjek penelitian untuk menyelidiki dan memvalidasi informasi atau data yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. Terakhir peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yang diambil dalam bentuk foto dan rekaman audio wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti fisik telah dilakukan penelitian dan sebagai bentuk arsip pribadi dalam pengumpulan data dan informasi mengenai implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Model analisis dan interpretasi data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah model analisis kualitatif dari Miles dan Huberman (1992: 15-21) sebagai model pemeriksaan cerdas dan model investigasi serupa dengan membandingkan konsekuensi eksplorasi dan pemeriksaan masa lalu. Informasi penelitian sebagai kalimat dari efek samping persepsi, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Informasi ditangani dengan menyusun, merekam, dan mengubah. Pemeriksaan informasi pada penelitian ini terdiri atas tiga tahapan yaitu proses mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam hal mereduksi data, yaitu mereduksi data yang didapatkan mengenai implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. Kemudian dalam hal penyajian data, yaitu mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah menjawab semua rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data sebagai berikut.

- 1) Data informasi valid yang menunjukkan tingkat ketepatan antara informasi yang benar-benar terjadi pada pelaksanaan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang dengan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

- 2) Data informasi reliable yang dapat dipercaya mengenai tingkat konsistensi atau kemantapan informasi dalam pelaksanaan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang dalam rentang waktu tertentu.
- 3) Data informasi objektif sehubungan dengan pengaturan antara banyak individu. Artinya, semakin banyak individu yang memberikan informasi serupa mengenai pelaksanaan kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang, maka pada saat itu informasi tersebut menjadi informasi yang objektif.

Untuk memperoleh data yang valid, reliable, dan objektif dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Terdapat tiga pembagian triangulasi yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi teori.